

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2020

Penulis

Amir Akbar Nurul Qomar

ABSTRAK

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini peran Undang-Undang Tipikor menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi sebagai sebuah faktor yuridis dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) fungsionalisasi undang-undang tipikor dalam putusan hakim peradilan pidana, dan (2) hambatan dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kelemahan pada undang-undang tipikor.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam studi kasus penulis pada putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg memberikan gambaran dalam proses peradilan yang pada tahap pengadilan sebagai bentuk fungsionalisasi undang-undang tipikor yang dijabarkan alur persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh seorang Camat di Kabupaten Wonogiri, (2) Kelemahan-kelemahan pada substansi undang-undang tipikor berakibat pada tidak efektif dan tidak maksimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menjadi hambatan tersendiri pada proses peradilan pidana kasus korupsi. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut terdapat dalam beberapa rumusan pasal-pasal tindak pidana korupsi yaitu dalam substansi korupsi merugikan keuangan Negara, pengembalian kerugian keuangan Negara, korupsi suap, dan gratifikasi dan sistem pembuktian terbalik. Solusi dalam mengatasi hambatan berupa kelemahan yang ada pada produk hukum Undang-Undang Tipikor yang membagi menjadi dua kebijakan yang perlu dilaksanakan Negara dalam meninjau kembali substansi hukum yang ada terkait tindak pidana korupsi pada Undang-Undang Tipikor yaitu kebijakan formulasi dalam rumusan pasal dan kebijakan formulasi bentuk sanksi pidana.

Kata Kunci : Fungsionalisasi, Undang-Undang Tipikor, Putusan Hakim Peradilan Pidana

ABSTRACT

The Corruption Eradication Act specifically regulates its own procedural law for law enforcement perpetrators of corruption, in general distinguished from other specific criminal handling. Corruption eradication must always be made a priority of

the government agenda to be dealt with seriously and urgently and as part of a program to restore the trust of the people and the international community in order to enhance the economic growth of a country concerned, Indonesia is no exception. In this case, the role of the Corruption Act becomes the basis for law enforcers in carrying out the criminal justice process for corruption as a juridical factor in the law enforcement process.

This study aims to review and analyze: (1) the functioning of the criminal act of corruption in the decision of the criminal justice judge, and (2) the obstacles in the implementation of the criminal act of corruption as a weakness in the criminal act of corruption.

The method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data obtained directly from the field, and secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) In the case study the author on the verdict of the Corruption Court at the Semarang District Court Number 25 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Smg provides an overview of the judicial process which at the court stage is a form of functionalization of the Corruption Law which spells out the flow of the trial in the corruption case jointly carried out by a sub district head in Wonogiri Regency, (2) Weaknesses in the substance of the Corruption Law result in the ineffectiveness and ineffectiveness of law enforcement on criminal acts of corruption and become a separate obstacle in the criminal justice process in corruption cases. The weaknesses are contained in several formulations of articles of criminal acts of corruption, namely in the substance of corruption detrimental to State finances, repayment of State financial losses, bribery corruption, and gratuities and reverse verification systems. Solutions to overcome obstacles in the form of weaknesses that exist in the legal product of the Law on Corruption Act which divides into two policies that need to be implemented by the State in reviewing the existing legal substance related to criminal acts of corruption in the Corruption Act Act, namely the formulation policy in the formulation of article and formulation policy in the form of criminal sanction.

Keywords: Functionality, Corruption Crime Act, Criminal Justice Judge's Decision

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
-------------------------	-----